



Renja perubahan SATPOL PP DAN LINMAS TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN
NATUNA**



NIP. 19730816 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan.....	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	17
4.2. Cascading dan Crosscutting	17
BAB IV PENUTUP.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Laporan Realisasi Anggaran Per Semester 1 Tahun 2024	7
Tabel 2.2	:	 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II (Semester I) Tahun 2024.....	10
Tabel 2.3	:	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Semester II Tahun 2024.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
- Lampiran II : Cascading Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024
- Lampiran III : Cross Cutting Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna berupa memberdayakan sumber daya yang ada, memfungsikan segala komponen yang ada untuk mencapai target ditahun 2024. Tujuannya adalah agar semua fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna menjadi lancar dalam pelaksanaannya.

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan penegakan di bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- e. mengkoordinasikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mematuhi dan menaati peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. mengkoordinasikan urusan pelatihan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- g. menetapkan program penegakan di bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya; dan

h. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- f. Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

c. Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dengan Aparat Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkungan tugasnya;

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 269);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

1. Maksud

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

2. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tahun 2024;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

- Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024
- Bab IV Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN LINMAS KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut realisasi anggaran sampai dengan wulan II (Semester 1) Tahun 2024

Tabel 2.1

Laporan Realisasi Anggaran Per Semester 1 Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA					
LAPORAN REALISASI RINCIAN SEMESTER I 2024					
TAHUN ANGGARAN 2024					
Urusan Pemerintahan		: 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
SKPD		: 1.05.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Unit Kerja		: [SEMUA]			
NOUR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SEMA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
02.00.		20.974.000,00	20.974.000,00	20.974.000,00	100,00%
02.2.01.	Pemerintahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.714,000,00	20.974,000,00	20.974,000,00	24,47%
02.2.01.0000.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	85.714,000,00	20.974,000,00	20.974,000,00	24,47%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.620,000,00	3.719,796,00	5.289,210,00	41,60%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	2.500,000,00	488,506,00	2.011,500,00	19,94%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover	2.000,000,00	421,000,00	1.579,000,00	21,05%
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000,000,00	0,00	1.000,000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	940,000,00	940,000,00	940,000,00	100,00%
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500,000,00	596,800,00	4.903,200,00	36,40%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.200,000,00	479,024,00	720,976,00	39,23%
5.1.02.04.04.0010.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggambaran)	1.700,000,00	300,000,00	899,000,00	24,00%
5.1.02.04.04.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	57.000,000,00	79.146,437,00	28.460,519,00	33,25%
5.1.02.04.04.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400,000,00	2.790,000,00	1.750,000,00	40,00%
02.3.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.880,702,000,00	4.473,289,284,00	4.389,362,280,00	37,69%
02.3.02.0000.	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.880,702,000,00	4.473,289,284,00	4.389,362,280,00	37,69%
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.017,423,000,00	2.203,672,800,00	1.752,747,200,00	56,39%
5.1.01.01.01.0003.	Belanja Gaji Pokok PPPK	25,314,000,00	5.010,800,00	15.703,200,00	31,79%
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	449,098,000,00	293,118,902,00	159,817,648,00	66,28%
5.1.01.01.02.0004.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.207,000,00	446,504,00	2.760,496,00	11,99%
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145,290,000,00	86,440,000,00	64,950,000,00	55,37%
5.1.01.01.03.0003.	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	373,555,000,00	196,000,000,00	174,555,000,00	49,54%
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Pungutan Umum PNS	47,090,000,00	29,110,000,00	23,848,000,00	50,38%
5.1.01.01.04.0004.	Belanja Tunjangan Pungutan Umum PPPK	1.698,000,00	888,000,00	1.140,000,00	52,30%
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Bekerja PNS	294,071,000,00	166,190,046,00	120,917,000,00	56,40%
5.1.01.01.06.0003.	Belanja Tunjangan Bekerja PPPK	2,214,000,00	424,520,00	1,779,480,00	71,40%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	246,149,000,00	69,000,210,00	177,138,790,00	27,98%
5.1.01.01.07.0004.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembiayaan Gaji PNS	64,000,00	33,663,00	31,663,00	51,35%
5.1.01.01.08.0003.	Belanja Pembiayaan Gaji PPPK	5,000,00	243,00	4,757,00	4,89%
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Baku Zaminan Kematian PNS	360,017,000,00	176,562,337,00	181,459,605,00	48,71%
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Baku Zaminan Kematian PPPK	1,200,000,00	289,028,00	943,972,00	21,44%
5.1.01.01.10.0004.	Belanja Baku Zaminan Kematian Kerja PNS	8,280,000,00	4,074,268,00	4,055,732,00	49,21%
5.1.01.01.10.0003.	Belanja Baku Zaminan Kematian Kerja PPPK	62,000,00	15,376,00	47,622,00	24,41%
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Baku Zaminan Kematian PNS	24,845,000,00	12,222,736,00	12,622,341,00	49,20%
5.1.01.01.11.0003.	Belanja Baku Zaminan Kematian PPPK	189,000,00	48,182,00	140,818,00	24,41%
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Gaji Kerja PNS	2,741,763,862,00	1,786,779,862,00	889,878,800,00	56,39%
5.1.01.02.01.0004.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Gaji Kerja PPPK	7,802,110,00	0,00	7,802,110,00	0,00%
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Gaji Kerja PNS	441,511,184,00	237,488,234,00	204,043,150,00	83,79%
5.1.01.02.02.0003.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Gaji Kerja PPPK	1,871,833,00	0,00	1,871,833,00	0,00%
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3,208,044,288,00	1,786,779,862,00	1,428,144,288,00	56,40%
5.1.01.02.03.0004.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	36,257,324,00	0,00	36,257,324,00	0,00%
5.1.01.03.01.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.887,000,00	16.215,625,00	20.471,375,00	33,29%
5.1.01.03.01.0003.	Belanja Honorarium Pengelola Barang/Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Jasa Penghasilan BPD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14,700,000,00	3,876,000,00	11,024,000,00	20,00%
02.3.03.	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	449,819,000,00	6,419,179,00	463,401,821,00	1,44%
02.3.03.0000.	Pengadaan Pakaian Dinas Seragam ASBUD Kabupaten/Kabupaten	449,819,000,00	6,419,179,00	463,401,821,00	1,44%
5.1.01.03.01.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.887,000,00	16.215,625,00	20.471,375,00	33,29%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	94,000,00	0,00	94,000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover	152,000,00	0,00	152,000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240,000,00	0,00	240,000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	347,280,000,00	0,00	347,280,000,00	0,00%
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	100,000,000,00	0,00	100,000,000,00	0,00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggambaran)	265,000,00	0,00	265,000,00	0,00%
02.3.04.	Administrasi (Guru Perangkat Daerah)	422,746,040,00	22,888,676,00	209,857,364,00	44,82%
02.3.04.0000.	Pemeliharaan Pakaian dan Perlengkapan Kantor	422,746,040,00	22,888,676,00	209,857,364,00	44,82%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.068,500,00	6,946,350,00	12.222,150,00	44,61%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover	25.000,000,00	13,500,000,00	12,500,000,00	80,00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14,500,000,00	4,780,700,00	9,719,300,00	32,48%

Rencana Kerja Perubahan Satpol PP dan Linmas Kabupaten NatunaTahun 2024

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
01.2.04.0001.	Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	10.000.000.00	1.043.000.00	4.158.000.00	10.43%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000.00	1.043.000.00	4.158.000.00	10.43%
01.2.04.0002.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.700.700.00	21.700.400.00	20.000.300.00	48.41%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.702.500.00	5.315.000.00	10.447.500.00	36.00%
5.1.02.01.04.0110.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.000.200.00	16.385.400.00	12.614.800.00	56.50%
01.2.04.0006.	Penyediaan Bahan Kertas dan Perlakuan Perawatan-utangkasan	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Langganan Jurnalistik Kaba Majalah	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00%
01.2.04.0009.	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAMP	602.400.000.00	100.000.700.00	100.000.000.00	16.61%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.000.000.00	12.000.700.00	17.700.000.00	40.10%
5.1.02.01.01.0003.	Belanja Sekwa dan Pakaian Sahaja	3.500.000.00	0.00	3.500.000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000.00	11.000.000.00	12.999.000.00	45.83%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.000.000.00	3.000.000.00	5.000.000.00	41.67%
5.1.02.01.12.0001.	Belanja Sewa Sewa Tenda	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Kota	210.000.000.00	131.353.200.00	88.646.800.00	62.21%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	305.000.000.00	10.000.000.00	171.000.000.00	18.42%
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemertitahan Daerah	1.010.000.000.00	210.000.700.00	710.000.400.00	21.77%
01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	10.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Kota	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	210.000.000.00	70.000.000.00	140.000.000.00	33.33%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000.00	0.00	500.000.000.00	0.00%
01.2.07.0002.	Pengadaan Motor	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	10.00%
5.1.02.05.00.0001.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	10.00%
01.2.07.0006.	Pengadaan Perlakuan dan Haul Lainnya	200.000.000.00	200.000.700.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.000.000.00	10.000.700.00	27.140.000.00	30.20%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Sewa Tenaga Administrasi	7.100.000.00	1.112.000.00	5.988.000.00	21.40%
5.1.02.05.00.0004.	Belanja Modal Alat Peningin	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.05.00.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/VHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.02.05.00.0003.	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/VH	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.02.10.01.0001.	Belanja Modal Personal Computer	210.000.000.00	210.150.000.00	250.000.00	95.85%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemertitahan Daerah	4.010.000.000.00	1.400.700.000.00	2.609.300.000.00	49.89%
01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Rental Milyard	10.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	10.00%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Beroda Dua	10.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	10.00%
01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Rental Daya Air dan Listrik	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Tagihan Telekom	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Tagihan Air	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	0.000.000.000.00	100.00%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.000.000.00	10.000.700.00	20.000.000.00	25.00%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Sewa Tenaga Administrasi	4.000.000.00	2.210.000.000.00	2.120.000.000.00	51.00%
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Sewa Tenaga Pelayanan Urusan	50.000.000.00	40.000.000.00	50.000.000.00	41.17%
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Sewa Jasa Lain-lain (Sewa) bagi Non ASN	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Sewa Jasa Lain-lain (Sewa) bagi Non ASN	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0007.	Belanja Sewa Jasa Lain-lain (Sewa) bagi Non ASN	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	100.00%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemertitahan Daerah	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
01.2.09.0001.	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.000.000.00	10.000.700.00	17.000.000.00	21.17%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pakaian	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	49.12%
5.1.02.01.01.0003.	Belanja Sewa Gedung/Sewa Gedung Alat Angkut	70.000.000.00	40.000.000.00	30.000.000.00	54.30%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Sewa Tenaga Administrasi	10.000.000.00	1.000.000.00	5.000.000.00	41.67%
5.1.02.01.01.0007.	Belanja Pemeliharaan Pajak, Sewa, dan Perlakuan	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00%
5.1.02.01.04.0001.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
01.2.09.0004.	Pemeliharaan Perlakuan dan Haul Lainnya	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Temporal Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000.00	10.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
01.2.01.	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemertitahan dan Kebertahan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	0.000.000.000.00	100.00%
01.2.01.0004.	Pemertitahan dan Kebertahan Umum	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	0.000.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.000.000.00	1.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Dinas	1.000.000.00	1.000.000.00	0.000.000.00	100.00%
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.02.01.01.0007.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00%
5.1.02.01.04.0110.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00%

Rencana Kerja Perubahan Satpol PP dan Linmas Kabupaten NatunaTahun 2024

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,100,000.00	7,054,407.00	45,593.00	99.36%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,337,000.00	35,740,000.00	38,597,000.00	48.08%
02.2.01.0005.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polik Pemasangan dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berwawasan Hak Asasi Manusia	129,437,000.00	42,794,407.00	86,642,593.00	7.30%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,228,200.00	0.00	1,228,200.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	709,500.00	630,000.00	79,500.00	89.47%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00%
5.1.02.03.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
5.1.02.03.12.0001.	Belanja Kursus, Singkapan/Pelatihan	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,947,000.00	9,395,628.00	51,551,372.00	15.42%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,062,000.00	0.00	50,062,000.00	0.00%
02.2.01.0015.	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	283,837,000.00	180,000,007.00	103,836,993.00	63.79%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28,430,000.00	12,021,790.00	16,408,210.00	41.58%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,300,000.00	3,216,880.00	1,083,120.00	74.81%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,600,000.00	1,596,000.00	1,004,000.00	61.37%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,300,000.00	750,000.00	550,000.00	60.92%
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250,000.00	490,000.00	0.00	87.81%
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,340,000.00	11,051,000.00	4,380,000.00	73.14%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	102,400,000.00	128,137,000.00	25,737,000.00	76.42%
5.1.02.03.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9,510,000.00	3,960,000.00	5,550,000.00	41.64%
5.1.02.03.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	8,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	75.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118,840,000.00	69,701,867.00	49,138,133.00	41.82%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	280,940,000.00	62,847,600.00	218,092,400.00	22.37%
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	45,940,000.00	0.00	45,940,000.00	0.00%
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mobil	84,530,000.00	84,330,000.00	200,000.00	99.74%
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	10,630,000.00	10,000,000.00	630,000.00	99.72%
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	6,000,000.00	5,340,000.00	660,000.00	89.00%
02.2.02.	Pengadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	667,117,000.00	60,096,285.00	60,220,045.00	41.12%
02.2.02.0011.	Pengadaan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	667,117,000.00	60,096,285.00	60,220,045.00	41.12%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16,258,000.00	6,750,275.00	9,507,725.00	41.67%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Datar	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00%
5.1.02.03.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,650,000.00	686,110.00	963,890.00	41.58%
5.1.02.03.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	2,323,600.00	0.00	2,323,600.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,820,000.00	0.00	14,820,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108,412,170.00	61,420,000.00	46,992,170.00	56.65%
02.2.03.	Pembinaan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	96,400,000.00	13,151,493.00	83,248,507.00	13.32%
02.2.03.0006.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	96,400,000.00	13,151,493.00	83,248,507.00	13.32%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10,370,000.00	4,320,000.00	6,050,000.00	41.67%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	686,400.00	567,700.00	118,700.00	82.71%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	527,100.00	0.00	527,100.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2,350,000.00	371,330.00	1,978,670.00	15.39%
5.1.02.03.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
5.1.02.03.12.0001.	Belanja Kursus Singkapan/Pelatihan	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,300,000.00	7,202,007.00	31,097,993.00	19.04%
TOTAL		22,082,002,011.00	10,280,000,000.00	10,407,700,122.00	46.14%

Dari laporan realisasi anggaran 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per Semester 1 Tahun 2024 dengan Belanja Operasi sebesar 49.14% dan Belanja Modal sebesar 31.73%. Sedangkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna berjalan dengan baik dengan rata-rata capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nilai Laporan LKjIP sampai dengan triwulan II diperoleh 70.30%, sedangkan Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP sampai dengan triwulan II diperoleh 85%. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sampai dengan triwulan II diperoleh 36.57%.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.2

ekejap.natunakab.go.id/laporan/evaluasi/renja?tw=TW2

Kode	Sektor	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Satuan	Target Rencana PD pada Tahun 2021 s/d 2023 (jumlah rencana PD)		Realisasi capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran (Tahun 2024) yang direvisi		Realisasi Kinerja pada Tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja PD yang direvisi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja 2024 yang direvisi (%)		Realisasi Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2024		Target Capaian Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7		8		9		10		11		1240+01040		1240+1000		1440+02		1440+1000		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Berapa	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
106.02.08.01		Pengelolaan Bahay/Subsistem	Jumlah Pokok Bahay/Subsistem yang Diadakan	Pokok	1	1,000,000	0	1	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
105.02.08.06		Penyeenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKP)	Jumlah laporan Penyeenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKP)	Laporan	28	88,000,000	21	106,372,81	28	88,000,000	28	471,021,880	30	105,490,044	27	90,025,140			27	358,278,710	95.42	92.19	288	106,372,81	109,429	106,37	
106.06.040		Pengelolaan Bening Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan/bening mula perangkat daerah	Persentase	76	2,431,698,000	388	688,287,969	76	1,868,288,000	76	684,480,889	1.66	28,388,638	16.88	304,862,268			16	362,658,288	14.18	69.92	188.68	688,287,969	187.44	14.38	
106.02.07.03		Pengelolaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang Diadakan	Unit	1	2,718,000,000	3	28,880,000	1	1,771,000,000	1	100,000,000	0	0	0	10,380,000			0	10,380,000	280.00	30.38	8	28,880,000	800.00	9.87	Belum ada realisasi kinerja di TW II
106.02.07.06		Pengelolaan Mobil	Jumlah Pokok Mobil yang Diadakan	Unit	8	20,000,000	16	87,722,710	8	20,000,000	8	10,000,000	0	0	0	10,000,000			20	10,000,000	880.00	80.81	28	87,722,710	100.00	338.81	
106.02.07.08		Pengelolaan Pamboran dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pamboran dan mesin lainnya yang Diadakan	Unit	6	80,000,000	6	30,889,250	6	80,000,000	6	300,480,000	0	20,194,500	12	194,303,250			12	171,098,250	240.00	69.22	18	30,889,250	360.00	164.30	Belum ada realisasi di TW II
105.02.07.01		Pengadaan Kue Tetap lainnya	Jumlah Unit Kue Tetap lainnya yang Diadakan	Unit	5	80,000,000	0	0	5	80,000,000	5	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
106.02.080		Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan sarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	70	8,768,888,000	348	8,862,323,620	70	8,728,888,000	70	3,887,888,000	4.88	1,178,882,240	6.66	1,284,982,048			16	4,818,888,120	16.87	108.68	188.81	8,862,323,620	327.81	184.07	
105.02.08.05		Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3,800,000	34	21,886,000	3	3,800,000	3	10,000,000	300	3,800,000	300	3,800,000			300	10,000,000	10,000.00	100.00	94	21,886,000	21,886.00	703.28	
105.02.08.02		Pelayanan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan lain-lain	Jumlah laporan Pelayanan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan lain-lain yang Diadakan	Laporan	2	80,000,000	13	76,659,322	2	80,000,000	2	71,000,000	0	6,410,440	0	12,500,517			0	44,000,040	100.00	51.90	18	76,659,322	800.00	95.41	
106.02.08.04		Pengelolaan Jasa Pelayanan (Jasa Kantor)	Jumlah laporan/Pengelolaan Jasa Pelayanan dan Kantor yang Diadakan	Laporan	0	6,811,686,000	14	6,784,280,360	0	6,811,686,000	0	3,600,000,000	80	197,648,708	161	1,048,054,802			161	3,054,480,000	8,080.00	10.40	178	6,784,280,360	6,784.00	95.82	
106.02.080		Pemeliharaan Bening Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	70	168,000,000	380	662,841,280	70	168,000,000	70	408,800,000	240	127,348,280	338	104,188,800			881	178,078,280	1,076.67	92.82	181	662,841,280	1,388.88	184.18	
106.02.08.03		Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Rupa Pemeliharaan, Injeksi dan Pamboran Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dipamboran Pupuk dan Peltinannya	Unit	10	280,000,000	0	883,764,260	10	280,000,000	10	380,000,000	4	10,384,260	4	88,080,800			4	330,002,360	40.00	83.16	16	883,764,260	160.00	280.88	Terdapat pemeliharaan injeksi, sehingga 10 unit terdapat 4 unit di TW I dan 2
106.02.08.06		Pemeliharaan Pamboran dan mesin lainnya	Jumlah Pamboran dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	76,000,000	0	69,880,000	0	76,000,000	0	40,000,000	64	6,800,000	68	10,000,000			68	10,800,000	3,080.00	84.00	72	69,880,000	3,680.00	10.47	
106.02.08.08		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	36,000,000	2	16,811,000	1	36,000,000	1	10,000,000	1	1,886,000	1	6,816,000			1	16,811,000	100.00	18.82	3	16,811,000	300.00	61.81	Belum ada realisasi di TW II, Realisasi Kinerja dilaksanakan di TW IV
106.02.08.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	80,000,000	0	0	7	80,000,000	7	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
106.02		PROGRAM PRINSIPAL KETIBERAMAN DAN KETIBERSAHAMAN	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Keterbacaan dan Keterbacaan	Persentase	80	862,000,000	60	871,704,348	80	1,881,000,000	80	1,881,971,810	8.83	208,278,328	18.88	218,878,323			2	862,888,220	2.48	72.88	61.88	871,704,348	77.48	188.28	
106.02.0.01		Pengelolaan dengan Keterbacaan dan Keterbacaan (Keterbacaan) [Keterbacaan] [Keterbacaan]	Persentase Pengelolaan dengan Keterbacaan dan Keterbacaan (Keterbacaan) yang diorganisir	Persentase	80	408,000,000	188	348,278,969	80	1,008,000,000	80	991,987,899	12.4	194,888,878	9.8	261,888,274			9	358,408,948	9.44	78.88	187.75	348,278,969	187.75	194.88	
105.02.02.01		Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dalam rangka Keterbacaan dan Keterbacaan Umum	Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dalam rangka Keterbacaan dan Keterbacaan Umum	Dokumen	1	10,000,000	1	71,275,717	1	10,000,000	1	84,710,710	1	30,191,250	1	14,000,407			0	12,890,007	200.00	89.08	0	71,275,717	300.00	340.88	Di TW II dalam dokumen yang Menerima Hasil Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dalam rangka Keterbacaan dan Keterbacaan Umum

Kode	Sektor	Usaha/Bagian Usaha/Perencanaan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana PD pada Tahun 2021 s.d 2024 (terdiri rencana 4Y)				Realisasi capaian kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran (Tahun 2024) yang direvisi				Realisasi Kinerja pada Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi				Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang direvisi (%)				Realisasi Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2024				Target Capaian Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2024				Keterangan
					5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
106.01.02.01		Pengadaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1,000,000	0	1	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00												
105.01.02.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (KAP)	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (KAP)	Laporan	20	100,000,000	21	106,370,291	20	100,000,000	20	471,013,890	30	106,490,044	27	90,251,140	27	206,271,700	86.63	83.79	200	106,370,291	100.429	106.37													
106.01.040		Pengelolaan Bening Mili Daerah Penunjang Usahan Perikanan Darat	Persentase penanganan bening mili penunjang usaha	Persen	76	2,431,000,000	100	680,267,869	76	1,663,200,000	76	584,400,000	1.04	26,305,630	16.00	26,443,250	36	361,635,260	24.10	66.92	100.00	680,267,869	107.44	24.20													
106.01.07.02		Pengelolaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1,070,000,000	3	208,880,000	1	1,070,000,000	1	100,000,000	0	0	0	70,380,000	0	70,380,000	200.00	70.38	6	208,880,000	600.00	9.87	Belum ada realisasi kinerja di TW IV												
106.01.07.06		Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	Unit	6	30,000,000	16	87,770,700	6	30,000,000	6	9,000,000	0	0	30	10,000,000	20	10,000,000	400.00	60.81	36	87,770,700	700.00	330.81													
106.01.07.08		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	10,000,000	6	30,985,260	6	10,000,000	6	300,400,000	0	0	30,985,260	0	254,500,250	0	270,395,250	240.00	60.22	36	30,985,260	300.00	104.30	Belum ada realisasi di TW III											
105.01.07.07		Pengadaan Kac Temp lainnya	Jumlah Unit Kac Temp lainnya yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	0	0	5	10,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00													
106.01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Perikanan Darat	Persentase penyediaan sarana penunjang usaha perikanan	Persen	70	6,710,880,000	100	8,843,333,420	70	6,710,880,000	70	1,807,000,000	4.68	1,070,863,240	4.64	1,364,380,000	14	4,890,000,000	16.87	100.00	100.00	8,843,333,420	107.81	164.37													
105.01.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3,000,000	34	21,990,000	3	3,000,000	3	10,000,000	300	3,800,000	300	3,800,000	300	10,000,000	10,000.00	100.00	100	21,990,000	21,990.00	700.00													
105.01.08.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	2	80,000,000	0	70,070,000	2	80,000,000	2	7,000,000	0	6,400,440	0	13,530,857	0	44,000,000	150.00	57.90	10	70,070,000	800.00	66.41													
106.01.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	6,881,000,000	14	8,795,260,000	0	6,881,000,000	0	3,660,000,000	160	1,050,640,700	160	1,040,000,000	160	3,064,400,000	6,000.00	10.40	176	8,795,260,000	6,760.00	764.92													
106.01.08		Pemeliharaan Bening Mili Daerah Penunjang Usahan Perikanan Darat	Persentase pemeliharaan sarana dan persentase penunjang usaha perikanan	Persen	76	310,000,000	100	662,640,200	76	310,000,000	76	400,000,000	3.60	127,340,200	3.00	104,380,000	801	276,170,300	1,074.67	93.62	800	662,640,200	1,300.00	184.76													
106.01.08.03		Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Insai dan Peralatan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan dan dibayarkan Pajak dan Pemeliharaan	Unit	10	200,000,000	10	843,764,200	10	200,000,000	10	380,000,000	4	10,381,240	4	80,000,000	4	330,000,000	40.00	60.76	16	843,764,200	760.00	200.66	Terdapat kesalahan input, sehingga di unit ini terdapat 4 unit di TW I dan 2												
106.01.08.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	0	70,000,000	0	40,000,000	0	70,000,000	0	40,000,000	64	6,800,000	64	10,000,000	64	30,000,000	3,000.00	64.00	72	40,000,000	3,600.00	10.47													
106.01.08.08		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	Unit	1	30,000,000	2	16,171,000	1	30,000,000	1	10,000,000	1	1,886,000	1	1,876,000	1	16,171,000	100.00	76.82	3	16,171,000	300.00	41.81	Belum ada realisasi di TW II, Realisasi Kinerja dilaksanakan di TW IV												
106.01.08.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	Unit	7	10,000,000	0	0	7	10,000,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00													
106.02		PROGRAM PENGUKUTAN KETERANGAN KAKI KETERANGAN KAKI	Cakupan Wilayah Pengukuran Pemula serta Ketersediaan dan Ketersediaan Saran	Persen	80	861,000,000	80	872,764,240	80	1,861,000,000	80	1,911,917,820	8.83	200,270,200	16.00	200,870,220	2	861,000,000	2.40	73.00	61.00	872,764,240	77.48	100.20													
106.02.01		Pengembangan Jaringan Ketersediaan dan Ketersediaan Usahawan (Jaku) (Jaku) (Jaku)	Persentase Pengembangan Jaringan Ketersediaan dan Ketersediaan Usahawan yang direvisi	Persen	80	400,000,000	100	740,070,000	80	1,000,000,000	80	910,987,800	12.4	104,500,070	9.6	104,200,274	0	708,400,000	9.44	76.00	102.75	740,070,000	102.10	104.03													
105.02.02.04		Pembelajaran/Pelatihan/Workshop dalam rangka Ketersediaan dan Ketersediaan Umum	Jumlah dokumen yang Menerima Hasil Pembelajaran/Pelatihan/Workshop dalam rangka Ketersediaan dan Ketersediaan Umum	Dokumen	1	10,000,000	1	75,270,000	1	10,000,000	1	84,701,070	1	31,000,200	1	14,200,407	2	73,900,000	200.00	80.00	0	75,270,000	300.00	34.00	Di TW II dalam unit Dokumen yang Menerima Hasil Pembelajaran/Pelatihan/Workshop dalam rangka Ketersediaan dan Ketersediaan Umum												

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Berdasarkan evaluasi renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Natuna Triwulan II tahun anggaran 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Terdapat satu Program dengan dua Indikator Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator (1) Nilai Laporan LKJIP dengan rata-rata capaian sebesar 70,30%.; dan (2) Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP dengan rata-rata capaian sebesar 85%; serta kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Belanja Modal dengan rata-rata capaian sebesar 231,81%.

2. Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Terdapat satu Program dan satu Indikator Program, yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada. Rata-rata capaian sebesar 40%.

3. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Terdapat satu program, yaitu Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, program ini terealisasi dengan capaian sebesar 8,27%.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya

Terdapat satu program, yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase Pembinaan PPNS, program ini belum terealisasi karena kegiatan tersebut ditargetkan terealisasi pada triwulan IV.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 sampai dengan triwulan II (semester 1) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Semester II Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Lakip	Nilai	76.50	0	0
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	0	0
3	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase	92	0	0
4	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persentase	92	0	0
Nilai rata-rata capaian kinerja					0

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2024.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja restra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat agar dapat hidup tenang, tidak gelisah serta menumbuhkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hal ini pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Urusan pembangunan tentunya bukan hanya menjadi urusan pemerintah sendirian. Semua unsur harus mendukung dan ikut terlibat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adalah kata kunci yang sangat strategis.

Selama ini harapan tersebut agak sulit dilaksanakan karena stigma negatif tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna hanyalah tukang gusur dan tukang tangkap pelajar yang berkeliaran saat jam belajar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gerakan Satuan Polisi Pamong Praja menuju Indonesia ramah sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 12 tahun 2016 dan Instruksi Mendagri No. 331.1/8024/Sj tahun 2017, konsep pembinaan, sosialisasi dan pencegahan harus ditonjolkan termasuk juga kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum akan dapat diwujudkan dengan memetakan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten tahun 2024 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024).

3.2 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Cascading Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran II (Cascading Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024)**, sedangkan Crosscutting Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Tahun 2024 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada **Lampiran III**

(Cross Cutting Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat bertanggung dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Satuan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024, maka penetapan prioritas pada urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain.

Semoga dengan tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 23 September 2024

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA**



IRLIZAP, S.Sos
NIP. 197308162002121004

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. NATUNA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00						15.565.673.919,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00							15.565.673.919,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00							15.565.673.919,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	15.974.985.031,00	15.272.582.816,00	19.493.360.479,00	-1.835.311.112,00							14.139.673.919,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	143.000.000,00	100.553.100,00	90.716.620,00	-52.283.380,00			-	-	-		138.888.888,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	138.000.000,00	100.553.100,00	90.716.620,00	-47.283.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.888.888,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.182.300.031,00	9.540.332.956,00	11.860.746.481,00	4.678.446.450,00			-	-	-		7.182.300.031,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91.00 Oran g/bulan	91.00 Oran g/bulan	7.182.300.031,00	9.540.332.956,00	11.860.746.481,00	4.678.446.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.182.300.031,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	197.000.000,00	206.387.380,00	471.995.650,00	274.995.650,00			-	-	-		172.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	172.000.000,00	206.387.380,00	471.995.650,00	299.995.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		172.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	380.500.000,00	528.909.380,00	620.015.380,00	239.515.380,00			-	-	-		260.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	92.500.000,00	44.018.000,00	62.018.000,00	-30.482.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	104.000.000,00	44.763.700,00	44.763.700,00	-59.236.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	100.000.000,00	425.127.680,00	498.233.680,00	398.233.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.983.200.000,00	504.400.000,00	1.063.592.188,00	-919.607.812,00			-	-	-		320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.772.200.000,00	0,00	0,00	-1.772.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	0,00	100.000.000,00	746.400.000,00	746.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	11.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	161.000.000,00	393.400.000,00	290.192.188,00	129.192.188,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.728.985.000,00	3.987.000.000,00	4.918.622.160,00	-810.362.840,00			-	-	-		5.755.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00	14.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	88.000.000,00	77.000.000,00	76.730.000,00	-11.270.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.637.985.000,00	3.900.000.000,00	4.827.492.160,00	-810.492.840,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.637.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	360.000.000,00	405.000.000,00	467.672.000,00	107.672.000,00			-	-	-		310.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	200.000.000,00	352.000.000,00	414.672.000,00	214.672.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	1.602.000.000,00	1.183.187.520,00	1.459.726.382,00	-176.000.000,00							1.426.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.348.000.000,00	932.987.090,00	1.191.207.340,00	-156.792.660,00			-	-	-		1.202.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	84.751.710,00	280.751.710,00	258.751.710,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	122.549.380,00	128.613.630,00	28.613.630,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				8 laporan	8 laporan	1.080.000.000,00	725.686.000,00	781.842.000,00	-298.158.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.080.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	182.000.000,00	146.499.840,00	164.598.400,00	-17.401.600,00			-	-	-		152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	2 Laporan	152.000.000,00	146.499.840,00	164.598.400,00	12.598.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	72.000.000,00	103.700.590,00	103.920.642,00	31.920.642,00			-	-	-		72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				50 Laporan	50 Laporan	72.000.000,00	103.700.590,00	103.920.642,00	31.920.642,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		J U M L A H							17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00						15.565.673.919,00		



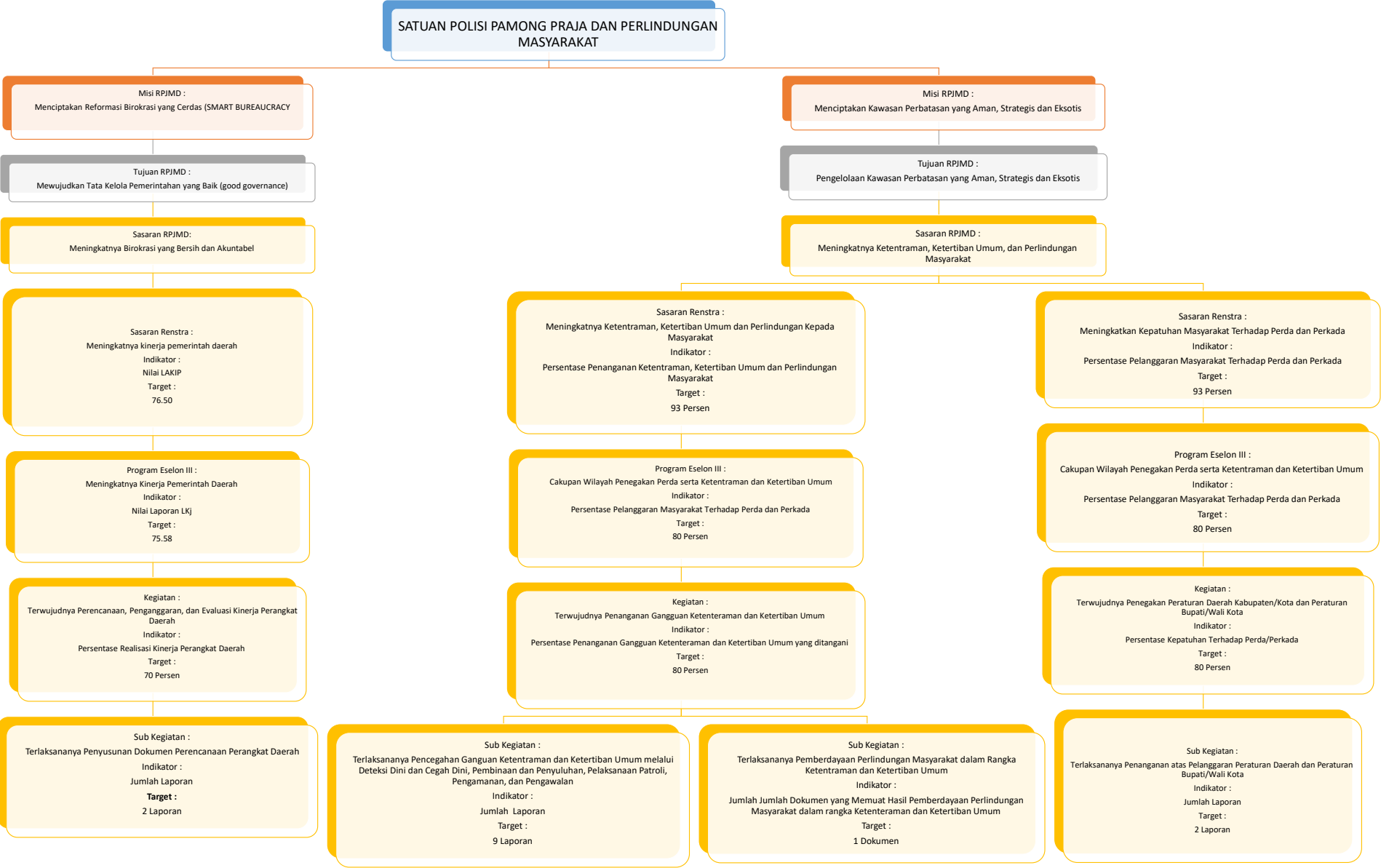
Kabupaten Natuna, 08 Aguatus 2024

Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

IRILIZAR, S.Sos

NIP. 19730816 200212 1 004



Cross Cutting Kinerja Program Satuan Polisi Pamomng Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna

